

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep struktural berkaitan erat dengan kepemimpinan, khususnya dalam konteks dakwah, yang melibatkan susunan, jabatan, dan pangkat da'i. Pernyataan ini dapat ditafsirkan sebagai metodologi yang metodis dan terorganisir yang mematuhi sistem yang ditetapkan dan menampilkan kecenderungan untuk memakai pengaruh dan berpartisipasi dalam proses eksekutif, yudikatif, dan legislatif.¹ Pemaparan ini menyoroti peran dan tanggung jawab negara, yang mencakup semua komponen penyusunnya, sebagai subjek atau pelaksanaan dakwah.

Kondisi ini dikarenakan potensi pengaruh negara untuk mengatur, mengubah, melarang dalam upaya menegakkan prinsip-prinsip Islam. Wacana saat ini berkaitan dengan implementasi dakwah melalui pengutamaan kedudukan dan peran kekuasaan pada suatu sistem yang dihasilkan oleh badan lembaga tersendiri dengan tujuan menangani gerakan individu. Diskursus dakwah struktural memerlukan kajian awal tentang interkoneksi antara agama (din) dan negara (dawlah).² Pada dasarnya, negara dapat dikonseptualisasikan sebagai wadah di mana individu diberi kebebasan untuk berfungsi sebagai Khalifah Allah dan hidup berdampingan secara harmonis, sehingga mencapai kepuasan baik di kehidupan sekarang maupun di akhirat.

¹ Tri Astuti Haryati, Miftahul Ula, Harpandi Dahri, *Dakwah Struktural Sebagai Pengarusutamaan Moderasi Islam di Indonesia & Brunei Darussalam* (Pekalongan, 2020), h.21

² Abdullah, *Dakwah Kultural Dan Struktural Telaah Pemikiran Hamka Dan M. Natsir*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012, h. 33

Dari perspektif tersebut dapat dipahami bahwa negara atau pemerintah melakukan kontrol terhadap berbagai aspek kehidupan individu, termasuk bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik, antara lain, sebagai komponen dari upaya dakwah struktural, dengan tujuan dalam menjaga kebenaran. Bentuk dakwah ini memiliki kecenderungan politis, karena melibatkan perumusan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan demi meningkatkan peran pemerintah dalam melaksanakan kegiatan dakwah dalam rangka perbaikan masyarakat.³ Selain itu, mengingat tanggung jawab dakwah dalam Al-Qur'an merupakan tugas wajib yang harus dijalankan oleh sistem pemerintahan sebagai fasilitator dakwah (QS. Al Imran/3: 104).

Tindakan dakwah yang mengacu pada dakwah Islam dapat diterapkan oleh badan pemerintah atau lembaga dengan istilah ihtisab atau hisbah. Istilah ini menampilkan tanggung jawab pemerintah untuk mempromosikan perilaku baik dan melarang tindakan jahat dalam masyarakat yang adil serta merata. Tujuan utama dari kegiatan tersebut yakni mencari keridhaan Allah SWT dan memperoleh pahala Ilahi.⁴ Dakwah mengacu pada upaya untuk mengubah keadaan tertentu menjadi lebih menguntungkan selaras dengan prinsip Islam. Di mana, aktivitas ini bertujuan mendorong individu atau masyarakat untuk mengadopsi ajaran Islam sebagai ajaran dan pandangan hidup.

Seperti yang terjadi pada program kerja Bappeda Provinsi Banten yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pembangunan yang baik ditandai dengan perencanaan yang cermat dan pelaksanaan yang sinergis serta kredibel. Adapun yang dimaksud dengan

³ Mulkhan, Abdul Munir, *Kesalahan Multikultural: Berislam secara Autentik-Kontekstual di atas Peradaban Global*, (Jakarta: PSAP, 2015) h.213

⁴ Zaidan, Abdul Karim, *Ushul al-Da'wah*, Beirut: AlRisalah, 2001, hlm 174

“sinergis” ialah kapasitas keluaran perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan secara terpadu lintas sektoral, serta antara pusat dan daerah. Perencanaan yang kredibel melibatkan penggabungan informasi terkini (*evidence based dan knowladge based*) dan berbasis pengetahuan saat ini serta memakai pendekatan partisipatif (*delivery mechanism*) dan berpikiran maju untuk implementasi.⁵ Syafi'ie berpendapat bahwa pembangunan dilihat dari kacamata administrasi pembangunan adalah perkembangan pertumbuhan dan transformasi yang disengaja dan sistematis yang dilakukan oleh suatu bangsa (*nation building*).⁶

Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) itu sendiri didapati visi, misi, program, tujuan, sasaran, strategi, orientasi kebijakan, pembangunan daerah, dan pendanaan daerah.⁷ Mencermati lanskap strategis yang terus berkembang, sangat penting untuk membangun masyarakat yang dinamis, maju, dan kompetitif yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip iman dan taqwa melalui implementasi Akhlakul karimah. Seperti yang termaktub pada visi pembangunan Provinsi Banten yang hendak diwujudkan dalam lima tahun ke depan yaitu :

Visi: Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berakhlakul Karimah.

Islam adalah agama yang komprehensif yang mencakup berbagai ajaran bagi pemeluknya. Aspek mendasar dari doktrin Islam berkaitan dengan prinsip-prinsip etis. Istilah “akhlak karimah” mengacu pada seperangkat perilaku yang dianggap terpuji atau terpuji, juga dikenal

⁵ Sumber <https://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/visi/>

⁶ Inu Kencana Syafi'ie, *ilmu pemerintahan*, (Jakarta:Bumi Aksara 20019), hlm.355

⁷ Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 47 ayat (5), Pasal 62, dan Pasal 66 ayat (2)

sebagai “fadilah”.⁸ Jadi Istilah “akhlak karimah” menunjukkan perilaku teladan yang berfungsi sebagai indikasi kelengkapan iman seseorang kepada Allah.⁹ Konsep Akhlakul Karimah diturunkan dari tindakan-tindakan yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang dianggap sebagai ciri mendasar dari individu yang berbudi luhur. Mengalami rasa malu ketika melakukan perbuatan asusila dianggap sebagai manifestasi dari memiliki nilai-nilai moral yang baik (akhlak karimah).

Dakwah struktural sangat berkaitan antara agama, negara, dan kepemimpinan termasuk kebijakan pemerintah Contoh daerah yang melaksanakan dakwah struktural adalah Provinsi Banten dan Bappeda Provinsi Banten yang di dalamnya terdapat kebijakan pemerintah yaitu RPJMD. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di dalam RPJMD terdapat visi Provinsi Banten yang menjunjung tinggi prinsip iman dan taqwa melalui implementasi akhlakul karimah. Dakwah struktural yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Banten dan RPJMD. Alasan peneliti menjadikan dakwah struktural oleh RPJMD Bappeda Provinsi Banten sebagai topik penelitian karena Bappeda Provinsi Banten merupakan salah satu pemerintahan yang melakukan dakwah struktural melalui kebijakan pemerintah.

Tujuan dari penelitian ini yakni menyelidiki proses perumusan kebijakan dakwah struktural dalam konteks situasi sosial serta politik agama. Studi ini akan mengkaji proses perumusan kebijakan yang terdiri dari identifikasi masalah, perumusan dan penentuan kebijakan, legitimasi, serta proses komunikasi. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis

⁸ Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2007), hal.: 200.

⁹ A.zainuddin dan Muhammad Jamhari, *AllIslam 2: Muamalah dan Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal.: 78

proses implementasi kebijakan yang terdiri dari keorganisasian, kepemimpinan, pemantauan, dan evaluasi, dan juga kinerja kebijakan yang mencakup hasil dan manfaat. Keunikan penelitian ini terletak pada implementasi dakwah struktural oleh Bappeda melalui RPJMD untuk membentuk akhlakul karimah.

Studi ini adalah bentuk penelitian kualitatif dengan teknik penelitian lapangan dan kebijakan. Studi ini memakai berbagai teknik pengumpulan data, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berlandaskan uraian di atas, maka peneliti tertarik mengajukan judul **“IMPLEMENTASI DAKWAH STRUKTURAL PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DALAM MEMBENTUK AKHLAKUL KARIMAH (Studi di Bappeda Provinsi Banten)”**.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana implementasi dakwah struktural pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam membentuk akhlakul karimah?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menjalankan program pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Bappeda Provinsi Banten dalam membentuk akhlakul karimah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui peran dakwah struktural pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam membentuk akhlakul karimah

2. Untuk Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menjalankan program pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Bappeda Provinsi Banten dalam membentuk akhlakul karimah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Memberikan wawasan yang berharga dan menambah basis pengetahuan baik bagi penulis maupun rekan-rekan mahasiswa, khususnya dalam ranah dakwah Islam.
 - b. Menjadi sumber informasi yang mendukung bagi peneliti dan pembaca mengenai kemajuan-kemajuan di bidang dakwah Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Studi ini memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, sekaligus berfungsi sebagai aplikasi praktis dari teori-teori yang dibahas dalam perkuliahan.
 - b. Mengetahui lebih lanjut tentang implementasi dakwah struktural dalam Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bappeda Provinsi Banten.
 - c. Sebagai titik referensi untuk upaya dan acara penelitian di masa depan, dengan tujuan memajukan kualitas penelitian.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan dan menjadi referensi penulis yakni:

1. *Dakwah dan Dimesi Politik (Studi Manajemen Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia(HTI) Di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)* Khairil Asmad Mahasiswa Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar.¹⁰ Tujuan penelitian ini adalah mengkaji praktik manajemen DPC-HTI Bajeng Barat dalam kaitannya dengan kegiatan dakwahnya di Desa Guntungang Kabupaten Gowa. Wacana tersebut terdiri dari dua aspek pokok, yaitu: (1) kepengurusan DPC-HTI dan (2) metodologi DPC-HTI Dakwah. Penelitian ini memakai metodologi kualitatif dengan pendekatan manajemen dakwah, dimana fungsi manajemen dipakai untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan dakwah. Penelitian ini berbagi kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam pemanfaatan metodologi penelitian kualitatif. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal kerangka teori, lokasi, dan subjek.

Hasil penelitian menampilkan bahwa DPC-HTI Bajeng Barat efektif memakai *Takhtith* (Perencanaan), *Tandzim* (Pengorganisasian), *Tawjih* (Menggerakkan atau melaksanakan), dan *Riqaabah* (Pengendalian dan evaluasi) dalam pengelolaan kegiatan dakwahnya di Desa Guntungang. DPC-HTI Bajeng Barat memakai dua pendekatan berbeda dalam pelaksanaan inisiatif dakwahnya, yakni *marhalah at-tatsqif* (pelatihan dan kaderisasi) dan *marhalah tafa'ul ma'al ummah* (interaksi masyarakat). Kedua pendekatan tersebut melibatkan berbagai kegiatan dakwah rutin, antara lain *halaqah*, diskusi, pengajian umum hari besar agama Islam, pengajian Magrib-Isya, MABIT, silaturahmi pimpinan, dan aktivitas sejenis lainnya. Aktivitas dakwah rutin DPC-HTI Bajeng Barat terpantau telah memberikan dampak transformatif bagi masyarakat Desa Guntungang, meskipun tidak sepenuhnya menyeluruh.

¹⁰ Khairil Asmad, *Dakwah dan Dimesi Politik (Studi Manajemen Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia(HTI) Di Desa Guntungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)* Makassar:Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017

2. *Dakwah Struktural Melalui Kebijakan Publik Di Pemerintahan Desa Margoyoso Jepara*. Miftahul Huda Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹¹ Kekhasan kajian ini terletak pada implementasi dakwah struktural oleh pemerintah desa, sebuah lembaga yang beroperasi di tingkat akar rumput dan dekat dengan masyarakat setempat, yang seringkali diasosiasikan dengan dakwah kultural. Penelitian bertujuan untuk mengkaji aspek prosedural dakwah struktural, serta hasil dan keuntungan dari pendekatan ini. Studi ini mengidentifikasi kesamaan dalam peserta penelitian, sementara perbedaan diamati dalam kerangka teori dan pengaturan geografis penelitian. Temuan penelitian ini menampilkan bahwa lahirnya kebijakan dakwah di Desa Margoyoso terkait erat dengan kebijakan otonomi desa, yang memberdayakan pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengelola wilayahnya secara khas dan individual. Lahirnya kebijakan dakwah didorong oleh dua faktor, yaitu isu-isu kemasyarakatan yang diwujudkan dalam bentuk kemerosotan etika dan politik yang berorientasi pada agama. Perumusan kebijakan dakwah yang meliputi shalat subuh berjamaah, penghentian menonton televisi setelah maghrib, pengajian, dan wajib hadir di madrasah diniyah yakni hasil kerja sama yang melibatkan Pemerintah Desa, tokoh agama, masyarakat, pimpinan, organisasi sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Koordinasi pelaksanaan dakwah struktural ini diawasi oleh Kepala Dinas dan Pemerintah Desa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Kebijakan ini menjadi alat yang berharga

¹¹ Miftahul Huda, *Dakwah Struktural Melalui Kebijakan Publik Di Pemerintahan Desa Margoyoso Jepara*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2019

untuk menumbuhkan rasa kebersamaan di antara warga, menyebarkan informasi tentang program Desa, dan meningkatkan kualitas pendidikan dan praktik keagamaan bagi warga. Implementasi pendekatan dakwah struktural, bila dilengkapi dengan pendekatan budaya dan manajemen dakwah yang efisien, berpotensi menjadi solusi yang layak untuk berbagai tantangan dakwah, termasuk kerusakan moral. Fokus pembahasan berpusat pada konsep Dakwah Struktural yang berkaitan dengan implementasi ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

3. *Strategi Kepemimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Dalam Membumikan Misi Dakwah Islam*. Risal Guntur Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.¹² Tujuan dari penelitian ini yakni menggambarkan Strategi Kepemimpinan Pemerintahan Daerah dan melihat faktor-faktor penentu yang mempengaruhi pelaksanaan Misi Dakwah Islam di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Jeneponto dan memakai metodologi kualitatif. Temuan studi menampilkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah mengimplementasikan inisiatif-inisiatif berbeda yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dakwah Islam di kalangan masyarakat. Inisiatif ini mencakup berbagai pendekatan, termasuk pendidikan, pribadi, berorientasi misi, dialogis, struktural, dan budaya. Aplikasi ini menyoroti berbagai tantangan yang berkaitan dengan dakwah di lapangan. Mubaligh dituntut untuk melakukan analisis yang teliti dan memberikan respon yang tepat terhadap isu-isu dakwah yang muncul dan ada. Pendekatan ini memungkinkan pemeriksaan dan rekonstruksi

¹² Risal Guntur, *Strategi Kepemimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Dalam Membumikan Misi Dakwah Islam*. Makassar:Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015

masalah-masalah keagamaan yang berkaitan dengan realitas objektif masyarakat sesuai dengan tatanan ideal Islam yang diinginkan. Dakwah Islam telah diberi tanggung jawab yang signifikan yang menuntut ketelitian, kebijaksanaan, dan kejernihan dalam mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi fokus, bersama dengan landasan teori yang mapan. Studi ini memiliki kesamaan dalam pemanfaatan metodologi penelitian kualitatif, namun berbeda dalam hal konteks geografis dan kerangka teoretisnya.

Temuan penelitian menampilkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah mengimplementasikan inisiatif yang berbeda untuk menanamkan nilai-nilai dakwah Islam kepada masyarakat, dengan strategi yang beragam seperti pendekatan pendidikan, personal, misi, dialogis, struktural, dan kultural. Aplikasi ini menyoroti berbagai tantangan di bidang dakwah yang membutuhkan penyelidikan dan tanggapan menyeluruh oleh Mubaligh. Tantangan tersebut berkaitan dengan fenomena aktual yang telah atau mungkin akan muncul dalam konteks dakwah. Pendekatan ini memungkinkan pemeriksaan dan rekonstruksi masalah-masalah keagamaan yang berkaitan dengan realitas objektif masyarakat sesuai dengan tatanan ideal Islam. Dakwah Islam saat ini dihadapkan pada tanggung jawab besar yang menuntut ketelitian, kecerdikan, dan kejernihan dalam mengidentifikasi domain yang menjadi fokus, bersama dengan landasan teori yang mapan. Temuan studi tersebut menyarankan agar Pemkab Jeneponto memprioritaskan pemantauan da'i yang aktif berdakwah di tengah masyarakat. Selain itu, pemerintah disarankan untuk meningkatkan level engagement dan komunikasi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi para da'i di lapangan.

4. *Implementasi Dakwah Struktural di Kecamatan Timpeh Kabupaten Dhamasraya*, Afandi Mahasiswa Institusi Agama Islam Negeri Bukittinggi 2022.¹³ Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan dakwah struktural di Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif, menggabungkan teknik pengumpulan data kualitatif seperti wawancara mendalam, observasi, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Data selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek serta lokasi. Penelitian ini memiliki

kesamaan karena memakai metodologi kualitatif deskriptif. Temuan ini menjelaskan bahwa pelaksanaan dakwah struktural di Kecamatan Timpeh meliputi pendirian lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, serta pendirian rumah tahfidz. Pendekatan kedua melibatkan pembinaan pemuda di dalam masjid, diikuti dengan penerapan program pendidikan terstruktur. Pendekatan keempat memerlukan pembinaan majlis taklim. Namun, pelaksanaan keempat metode dakwah tersebut secara optimal belum tercapai, sehingga diperlukan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilannya.

F. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam hal penyelesaian skripsi ini penyusun membuat sistematika untuk mempermudah pembahasan, yang dibagi kedalam lima bab, yaitu:

¹³Afandi, *Implementasi Dakwah Struktural di Kecamatan Timpeh Kabupaten Dhamasraya*, Bukittinggi: Institusi Agama Islam Negeri Bukittinggi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan yaitu tentang gambaran keseluruhan penelitian yang akan dilakukan serta pokok-pokok yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Pada bagian bab ini membahas tentang tinjauan pustaka dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/ alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, metode pengumpulan data, definisi konsep, dan variabel serta analisi data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Membahas hasil penelitian, yang didalamnya berupa penjabaran tentang objek penelitian, penyajian data penelitian, pengolahan terhadap data yang terkumpul dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan analisis dan korelasinya dengan teori yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan hasil penelitian dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.